

LKjIP



2023

BIRO PENGADAAN
BARANG DAN JASA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmatnya sehingga laporan ini dapat tersusun hingga selesai, Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Laporan Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan atas penggunaan anggaran yang berisi informasi kinerja yang terukur.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat informasi secara transparan dan akuntabel tentang capaian sasaran, pelaksanaan program dan realisasi anggaran Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk membangun penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan terukur. Tujuan dari SAKIP adalah untuk menciptakan pemerintah yang baik dan terpercaya. LKjIP juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menilai capaian kinerja dan pertanggungjawaban instansi pemerintahan guna meningkatkan kinerja serta bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan.

Penyusunan laporan kinerja ini merupakan bagian dari implementasi transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka good governance di lingkungan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, melalui pelaporan kinerja kami berharap terlihat sasaran yang telah tercapai maupun yang belum dapat diraih, sehingga Laporan Kinerja ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi kendala - kendala yang dihadapi dan solusi yang dapat diimplementasikan. Sehingga kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat di masa mendatang akan menjadi lebih baik.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 ini dapat memberikan manfaat untuk menentukan arah kebijakan dan strategi Biro Pengadaan Barang dan Jasa pada tahun-tahun mendatang.

Mamuju, 29 Februari 2024

Pengirim,

Plt. Kepala Biro,



Muhtar, S.P.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19641231 198711 1 036

DAFTAR ISI

BAB I	: PENDAHULUAN	3
BAB II	: PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	10
BAB III	: AKUNTABILITAS KINERJA	12
BAB IV	: PENUTUP	27

LAPORAN KINERJA

BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam rangka penyelenggaraan good governance, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan masing-masing instansi.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan akuntabilitas, transparansi, dan pertanggungjawaban pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023. Isi LKjIP Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 menggambarkan pencapaian sasaran Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023.

1.2 Gambaran Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 4 tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat mempunyai tugas :

1. Tugas Pokok

Biro Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian

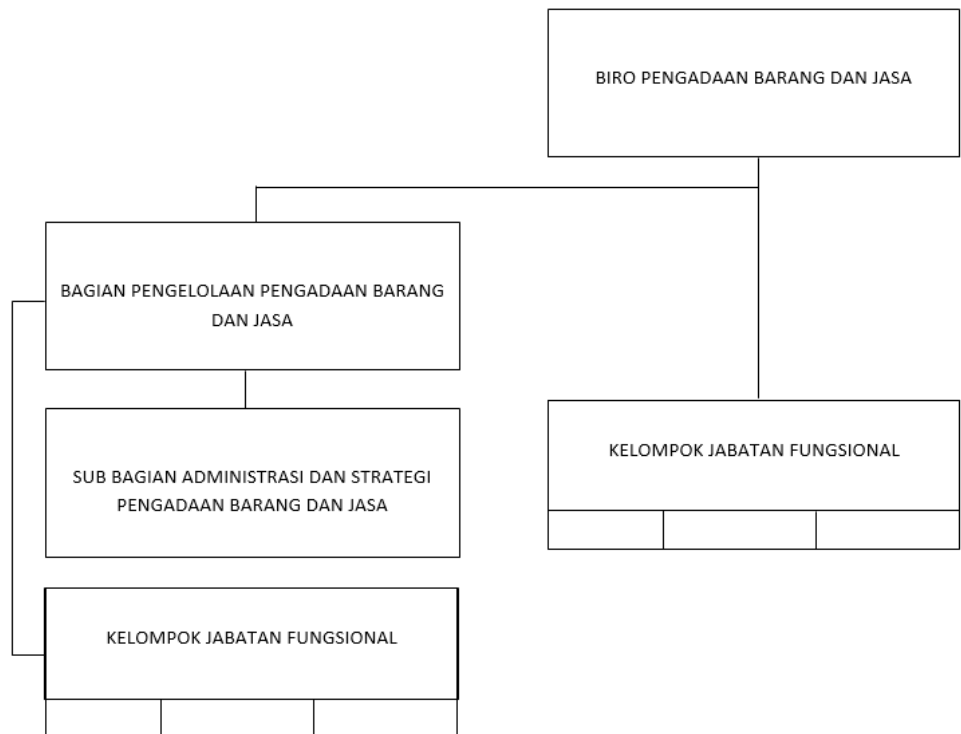
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok Biro Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- b. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

1.3 Struktur Organisasi



Biro Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas :

- a. Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa.

Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi dan Strategi Pengadaan Barang Dan Jasa; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Administrasi dan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas:

- a. Menginventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
- b. Melaksanakan riset dan analisis pasar barang/jasa;
- c. Menyusun strategi pengadaan barang/jasa;
- d. Menyusun dan mengelola katalog elektronik local/sectoral;
- e. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
- f. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;
- g. Melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/asset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
- h. Melaksanakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- i. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan renstra, renja, RKT, RKA, DPA, TAPKIN, LKJIP, LKPJ, dan LPPD lingkup Biro;
- j. Melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Biro;
- k. Melaksanakan perencanaan pemeliharaan perlengkapan biro;
- l. Melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- m. Melaksanakan pembinaan pegawai ASN;
- n. Melaksanakan review perencanaan pengadaan barang/jasa; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

1.4 Isu Strategis

Biro Pengadaan Barang dan Jasa melaksanakan berbagai tugas dan fungsi guna mewujudkan efektivitas pelayanan pengadaan barang/jasa. Berikut permasalahan utama (strategic issued) pada lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, yaitu:

1. Belum optimalnya proses pengadaan barang dan jasa
2. Belum optimalnya kapasitas SDM pengadaan barang dan jasa
3. Belum optimalnya fungsi advokasi dan kematangan kelembagaan barang dan jasa
4. Belum optimalnya pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik

1.5 Sumber Daya Aparatur

DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN JUMLAH PEGAWAI, KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN GOLONGAN

Unit Kerja : Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sulawesi Barat

Keadaan : Per 31 Desember 2023

JUMLAH PNS BERDASARKAN JENIS KELAMIN

1. Laki-laki.....	=	24	Orang
2. Perempuan.....	=	19	Orang
JUMLAH.....	=	43	Orang

NO	GOLONGAN/RUANG	JUMLAH PNS DAERAH PROVINSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1	IV/	4	-
2	a	1	-
3	IV/b	1	-
4	IV/c	-	-
5	IV/d	-	-
	IV/e	-	-
JUMLAH		6	-
6	III/a	11	-
7	III/b	7	-
8	III/c	1	-
9	III/d	16	-
JUMLAH		35	-
10	II/a	-	-
11	II/b	1	-
12	II/c	-	-
13	II/d	1	-
JUMLAH		2	-
14	I/	-	-
15	a	-	-
16	I/b	-	-
17	I/c	-	-
	I/d	-	-
JUMLAH		0	-
JUMLAH KESELURUHAN		43	-

JUMLAH PNS BERDASARKAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar (SD)	=	-	Orang
2. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	=	-	Orang
3. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	=	2	Orang
4. Sarjana Muda (SM)/ D-3	=	-	Orang
5. Sarjana (S-1)	=	34	Orang
6. Pasca Sarjana (S-2)	=	7	Orang
7. Doktoral (S-3)	=	-	Orang
JUMLAH	=	43	Orang

1.6 Sistematika Penulisan

1. Bab I Pendahuluan
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Gambaran Umum Biro Pengadaan Barang dan Jasa
 - 1.3. Struktur Biro Pengadaan Barang dan Jasa
 - 1.4. Isu Strategis
 - 1.5. Sumber Daya Aparatur
 - 1.6. Sistematika Penulisan
2. Bab II Perencanaan Kinerja
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja
4. Bab IV Penutup

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Perencanaan kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan, dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja.

Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang merupakan Unit Kerja dari Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat mempunyai peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Barat.

2.2. Strategi dan Kebijakan Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Strategi kebijakan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2023, tergambar dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Strategi dan Kebijakan

Strategi	Kebijakan
Mengoptimalkan proses pengadaan dan pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik	Penguatan pola koordinasi dan implementasi standar operasional prosedur pengadaan barang dan jasa secara elektronik
	Penguatan konsolidasi perencanaan pengadaan barang dan jasa
	Peningkatan sarana dan prasarana penunjang LPSE

3.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen perjanjian kinerja yang berisikan penugasan antara Gubernur Sulawesi Barat dengan Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, berikut tabel perjanjian kinerja tahun 2023

Tabel 2.1.

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	Optimalnya kebijakan di bidang pengelolaan barang dan jasa	Persentase pelayanan pengadaan barang dan jasa	100 %
		Persentase ketersediaan SDM	100 %
		Penilaian MCP KPK	100 %
		Pemenuhan standarisasi LPSE	17 standar

Program :

Anggaran

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Rp. 999.855.050,-

Kebijakan dan pelayanan pengadaan barang dan jasa

Rp. 2.000.144.950,-

Jumlah

Rp. 3.000.000.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sulawesi Barat merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2023 yang memuat realisasi kinerja dan capaian strategis kinerja atas target-target kinerja yang diperjanjikan tahun 2023. Selain itu, realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja tahun 2023 disajikan juga dalam Bab ini. Pengukuran kinerja adalah untuk menilai pencapaian secara kuantitatif setiap indikator kinerja sebagai bahan kontribusi bagi proses penilaian dan evaluasi atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kegiatan, kebijakan, tujuan, sasaran dan indikator kinerja. Tujuan lainnya adalah memberikan pemahaman bahwa pengukuran kinerja tidak hanya indikator output saja, tetapi juga outcome, manfaat dan dampak serta memberikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja yang lebih sistematis, terukur dan dapat diterapkan.

Kerangka Pengukuran kinerja di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sulawesi Barat dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Capaian Target(%)	Kategori Capaian Kinerja
$91 \leq 100$	Sangat Baik
$76 \leq 90$	Tinggi
$66 \leq 75$	Sedang
$51 \leq 65$	Rendah
≤ 50	Sangat Rendah

Capaian Kinerja Organisasi

Adapun capaian kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2023 berdasarkan kriteria penilaian realisasi kinerja dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2
Pengukuran capaian kinerja

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
Optimalnya Kebijakan di Bidang Pengelolaan Barang dan Jasa	Persentase pelayanan pengadaan barang dan Jasa	100 %	100 %	100 %
	Persentase ketersediaan SDM	100 %	95 %	95 %
	Penilaian MCP KPK	100 %	74 %	74 %
	Pemenuhan standarisasi LPSE	17 Standar	17 Standar	100 %
JUMLAH CAPAIAN KINERJA				92,25 %

Jadi, Capaian Kinerja pada tahun 2023 mencapai 92,25 %, sehingga dengan memperhatikan tabel standar pengukuran kinerja, capaian kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023 termasuk dalam kategori “**Sangat Baik**”.

Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sasaran :

“Optimalnya Kebijakan di Bidang Pengelolaan Barang dan Jasa”

Realisasi capaian per-indikator sasaran sebagai berikut:

a. Indikator Sasaran 1

Tabel 3.3
Evaluasi dan Analisis Kerja

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase pelayanan pengadaan barang dan jasa	100 %	100 %	100 %
Rata – rata persentase capaian sasaran			100 %

Tolak ukur dari capaian indikator sasaran adalah :

1. Persentase akses pelaku pengadaan dalam layanan pengadaan adalah 100 persen, seluruh pelaku pengadaan dapat mengakses layanan pengadaan.

2. Persentase kesesuaian data RUP dengan proses pengadaan adalah 100 persen, telah sesuai antara data RUP dengan proses pengadaan.
 3. Persentase pendampingan pelaku pengadaan barang dan jasa adalah 100 persen, tim dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa telah melakukan pendampingan.
 4. Persentase proses pengadaan barang dan jasa adalah 100 persen, proses pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah.
- b. Indikator sasaran 2

Tabel 3.4
Evaluasi dan Analisis Kerja

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase ketersediaan SDM	100 %	95 %	95 %
Rata – rata persentase capaian sasaran			100 %

Tolak ukur dari indikator sasaran adalah :

1. Kuota JF PBJ ahli pertama 10 dengan keterisian 11 orang
2. Kuota JF PBJ ahli muda 8 dengan keterisian 14
3. Kuota JF PBJ ahli madya 2 dengan keterisian 1

Adanya kelebihan dan kekurangan JF PBJ dikarenakan :

- Adanya mutasi 5 PNS JF ahli pertama ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa
- 10 pejabat pengawas (eselon IV) dialih fungsikan menjadi JF PBJ ahli muda
- 1 JF PBJ ahli madya menjadi JF analis kebijakan ahli madya

c. Indikator sasaran 3

Tabel 3.5
Evaluasi dan Analisis Kerja

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Penilaian MCP KPK	100 %	74 %	74 %
Rata – rata persentase capaian sasaran			74 %

Tolak ukur dari indikator sasaran adalah :

1. Inovasi pelaksanaan pengadaan
2. Pengendalian pengadaan
3. Penguatan profesionalisme pengadaan

d. Indikator sasaran 4

Tabel 3.6
Evaluasi dan Analisis Kerja

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Pemenuhan standarisasi LPSE	17 Standar	17 Standar	100 %
Rata – rata persentase capaian sasaran			100 %

Tolak ukur dari indikator sasaran adalah :

1. Terpenuhinya standarisasi kebijakan layanan
2. Terpenuhinya standarisasi pengorganisasian layanan
3. Terpenuhinya standarisasi pengelolaan asset
4. Terpenuhiny standarisasi pengelolaan resiko
5. Terpenuhinya standarisasi pengelolaan layanan help desk
6. Terpenuhinya standarisasi pengelolaan perubahan
7. Terpenuhinya standarisasi pengelolaan kapasitas
8. Terpenuhinya standarisasi pengelolaan SDM
9. Terpenuhinya standarisasi keamanan perangkat
10. Terpenuhinya standar keamanan operasional layanan
11. Terpenuhinya standarisasi keamanan server dan jaringan
12. Terpenuhinya standarisasi kelangsungan layanan
13. Terpenuhinya standarisasi pengelolaan anggaran
14. Terpenuhinya standarisasi pengelolaan pendukung layanan
15. Terpenuhinya standarisasi hubungan pengguna layanan
16. Terpenuhinya standarisasi pengelolaan kepatuhan
17. Terpenuhinya standarisasi penilaian internal

c. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun Sebelumnya.

Tabel 3.7

Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023
Persentase pelayanan pengadaan barang dan Jasa	100 %	100 %
Persentase ketersediaan SDM	75 %	95 %
Penilaian MCP KPK	89 %	74 %

Pemenuhan standarisasi LPSE	17 Standar	17 Standar
-----------------------------	------------	------------

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa didukung dengan program :

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Merupakan program dengan kegiatan rutin yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Keberhasilan program ini dapat dilihat dengan pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan perangkat daerah, administrasi umum perangkat daerah, pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan tepat waktu dan juga mampu menunjang capaian kinerja lainnya.

2. Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

Keberhasilan dari program ini adalah efektifitas pelayanan pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, optimalisasi LPSE, peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

Kegiatan – kegiatan yang telah dilaksanakan adalah :

1. Pelaksanaan katalog elektronik lokal

Usulan produk katalog elektronik lokal Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari :

The screenshot shows the 'e catalogue' website interface. At the top, there is a search bar labeled 'Cari Produk' and a 'Login' button. Below the search bar, there are navigation links: 'Beranda', 'Pengumuman', 'Berita', 'Monev', 'Unduh', 'Tanya Jawab', and 'Hubungi Kami'. The main content area is titled 'Provinsi Sulawesi Barat' and features a table of products. The table has columns for 'No.' and 'Nama Etalase Produk'. There are also controls for 'Menampilkan 50 data' and a 'Pencarian' search box.

No.	Nama Etalase Produk
1.	Alat dan/atau Mesin Pertanian Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat
2.	Alat Elektronik dan Perlengkapannya Provinsi Sulawesi Barat
3.	Alat Tulis Kantor Provinsi Sulawesi Barat
4.	Aspal Provinsi Sulawesi Barat
5.	Bahan Material Provinsi Sulawesi Barat
6.	Bahan Pokok Provinsi Sulawesi Barat
7.	Belanja Media Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat
8.	Benih Hortikultura Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat
9.	Benih Tanaman Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat
10.	Benih Tanaman Perkebunan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat
11.	Beton Precast Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat
12.	Beton Ready Mix Provinsi Sulawesi Barat
13.	Hewan Ternak Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat
14.	Jasa Akomodasi dan Paket Meeting Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
15.	Jasa Keamanan Provinsi Sulawesi Barat
16.	Jasa Kebersihan Provinsi Sulawesi Barat
17.	Jasa Pengelolaan Sampah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat
18.	Jasa Penyelenggaraan Acara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

14. Jasa Akomodasi dan Paket Meeting Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
15. Jasa Keamanan Provinsi Sulawesi Barat
16. Jasa Kebersihan Provinsi Sulawesi Barat
17. Jasa Pengelolaan Sampah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat
18. Jasa Penyelenggaraan Acara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
19. Jasa Service Perlengkapan dan Peralatan Perkantoran Provinsi Sulawesi Barat
20. Jasa Sewa Kendaraan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
21. Makanan dan Minuman Provinsi Sulawesi Barat
22. Meubeleur, Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga Provinsi Sulawesi Barat
23. Pakaian Dinas dan Kain Tradisional Provinsi Sulawesi Barat
24. Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat
25. Seragam Sekolah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat
26. Servis Kendaraan Provinsi Sulawesi Barat
27. Souvenir Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Menampilkan Halaman 1 dari 1



© 2022 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

2. Pelaksanaan reviu pemaketan

Dengan adanya reviu terhadap paket pengadaan barang/jasa maka diharapkan tidak ada kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa

3. Layanan pendampingan penginputan RUP pada aplikasi SiRUP

Tim dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa memberikan pendampingan dalam penginputan RUP kepada seluruh perangkat daerah lingkup Pemprov. Sulawesi Barat diharapkan SiRUP dapat terinput tepat waktu.

4. Melakukan monitoring dan evaluasi penginputan SiRUP

Monitoring dan evaluasi penginputan SiRUP untuk mengetahui kendala dan permasalahan dalam penginputan SiRUP.

5. Pendampingan ke LPSE Kabupaten lingkup Pemprov. Sulawesi Barat terkait pemenuhan 17 standarisasi LPSE







6. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa

Tabel 3.8

REKAP PELAKSANAAN TENDER BERDASARKAN JENIS PENGADAAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JENIS PENGADAAN	PAKET				PAGU				
		SELESAI	PROSES	GAGAL/ BATAL	TOTAL PAKET	SELESAI	PROSES	GAGAL/BATAL	SISA HPS	TOTAL PAGU
1	KONSTRUKSI	103	-	10	113	244.467.408.511,00	-	19.030.263.276,00	26.951.709.852,94	263.497.671.787,00
2	KONSULTANSI	15	-	4	19	4.954.300.000,00	-	612.050.000,00	370.033.138,00	5.566.350.000,00
3	BARANG	4	-	1	5	4.565.791.154,00	-	747.500.000,00	280.636.729,13	5.313.291.154,00
4	JASA LAINNYA	5	-	1	6	3.042.210.000,00	-	200.000.000,00	18.843.944,20	3.242.210.000,00
	TOTAL	127	-	16	143	257.029.709.665,00	-	20.589.813.276,00	27.621.223.664,27	277.619.522.941,00

7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
8. Pemenuhan tingkat kematangan Biro Pengadaan Barang dan Jasa dan pendampingan tingkat kematangan UKPBJ Kabupaten

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Status					Pencapaian Level Kematangan	Detail
		Belum Isi	Ter kirim	Revisi	Terverifikasi	Pembaharuan		
469	PROVINSI SULAWESI BARAT	0	0	3	3	3	8/9	 
470	Kabupaten Majene	1	0	0	8	0	4/9	 
471	Kabupaten Mamasa	0	0	0	6	3	1/9	 
472	Kabupaten Mamuju	0	2	4	3	0	2/9	 
473	Kabupaten Mamuju Tengah	0	0	2	1	6	1/9	 
474	Kabupaten Pasangkayu	3	0	3	3	0	2/9	 
475	Kabupaten Polewali Mandar	0	0	0	8	1	6/9	 

Showing 1 to 7 of 7 entries (filtered from 545 total entries)

<  >

9. Pemenuhan MCP KPK

HASIL PEMANTAUAN CAPAIAN KEGIATAN RENCANA AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2023

NO	AREA INTERVENSI/ INDIKATOR KEBERHASILAN	SUB INDIKATOR	DATA DUKUNG YANG DIPERLUKAN	OPD TERKAIT	CAPAIAN HASIL VERIFIKASI	KETERANGAN/ CATATAN HASIL VERIFIKASI
A.	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN					
B.	PENGADAAN BARANG DAN JASA					
1.	Inovasi Pelaksanaan Pengadaan	Pemenuhan Komitmen TKDN dan e-Purchasing	<p>Pemenuhan Komitmen TKDN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen Kepala Daerah terkait dengan Implementasi TKDN dalam SIPD 2. Screenshot Komitmen Kepala Daerah dalam SIPD terkait dengan % Implementasi TKDN 3. Realisasi Pemenuhan Implementasi TKDN oleh Pemerintah Daerah yang dinilai melalui aplikasi Monitoring TKDN yang ada <p>Implementasi e-Purchasing</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi e-Purchasing (Katalog Lokal dan Bela Pengadaan) <ol style="list-style-type: none"> a. Instruksi Kepala Daerah Implementasi e- Purchasing baik kepada Perangkat Daerah maupun Penyedia b. Regulasi dan Alur Pembayaran transaksi melalui e-purchasing (non tunai) 2. Daftar produk, etalase tayang dan penyedia yang terkait dalam implementasi e- purchasing baik bela pengadaan maupun katalog lokal. Termasuk nilai penggunaan e-purchasing berdasarkan etalase dan nama penyedia 3. Data realisasi implementasi e-purchasing pada masing-masing OPD 4. Total nilai pengadaan melalui e-purchasing dibandingkan total belanja modal dan barang. 5. Peningkatan produk, etalase, penyedia terkait dalam implementasi e-purchasing (tahun 2023 dibandingkan tahun 2022). 	Biro PBJ/ Inspektorat	80%	<p>tolong lengkapi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - komitmen KDH thd TKDN dalam SIPD - SK KDH terkait implementasi e-purchasing - reviu apip thd implementasi e-purchasing
			<p>Reviu/ Audit IT Implementasi e-Purchasing</p> <p>Laporan pelaksanaan reviu APIP atas implementasi e-purchasing yang memuat beberapa evaluasi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mekanisme pemilihan penyedia tanpa praktik penyusunan/ gratifikasi 2. Negosiasi harga implementasi e-purchasing 3. Evaluasi penyedia <p>Laporan ini dapat menjadi bagian dari Reviu Tata Kelola PBJ yang dilakukan oleh APIP. Laporan ini dapat juga berupa Laporan Hasil Audit IT atas implementasi e-purchasing.</p>			

		Pencegahan Korupsi Pengadaan Langsung	<p>Pengadaan Langsung Melalui Sistem1. Daftar Pengadaan Langsung dalam RUP;2. Daftar Pengadaan Langsung yang telah dilaksanakan berikut sistem yang digunakan (SPSE atau manual);3. Daftar SPK hasil Pengadaan Langsung yang sudah terealisasi.4. Regulasi internal Pemda untuk mendorong kewajiban input e-PL sebagai salah satu persyaratan pencairan anggaran.Konsolidasi PengadaanDaftar pengadaan yang kemudian dilakukan konsolidasi dilengkapi dengan: nama OPD, nama pengadaan, nilai HPS, jadwal pelaksanaan pengadaan konsolidasi, nama pemenang hasil konsolidasi, Nilai Pengadaan Hasil Konsolidasi (dibuat dalam tabel).</p> <p>Metode konsolidasi dapat berupa tender bersama atau penyatuan paket terpusat untuk kemudian di tenderkan.</p>	Biro PBJ	75%	daftar pengadaan langsung dalam RUP- regulasi internal pemda terhadap kewajiban input e-PL- metode konsolidasi- daftar pengadaan yang telah dilaksanakan
2.	Pengendalian Pengadaan	Reviu dan Transparansi Rencana Pengadaan	<p>Pelaksanaan Reviu Perencanaan Pengadaan Reviu ini dilaksanakan oleh UKPBJ untuk mendorong OPD memilih metode PBJ yang tepat dan membantu UKPBJ dalam menyusun timeline PBJ selama tahun berjalan, mendorong pelaksanaan inovasi PBJ, serta kebijakan lain sehubungan dengan pelaksanaan PBJ yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen RUP masing masing OPD; 2. Dokumen Hasil Reviu Pengadaan minimal berupa RUP Pemda Hasil Reviu Besama lengkap dengan Nama Pengadaan, jadwal sebelum dan sesudah reviu, metode pengadaan sebelum dan sesudah reviu, rencana kebutuhan masing-masing paket pengadaan dll, di TTD oleh Sekda (dilengkapi dokumentasi kegiatan, data Jumlah Pengadaan melalui rekapitulasi jumlah Tender, Jumlah Pengadaan Langsung, Jumlah Penunjukan Langsung, Jumlah Paket E-Purchasing, Jumlah Paket Swakelola) 3. Daftar Rencana Pengadaan Konsolidasi (minimal ada 5 pekerjaan) <p>Penayangan SIRUP Penayangan SIRUP 100% per 31 Maret 2023</p>	Biro PBJ	100%	

	Pencegahan Korupsi Proyek Strategis Daerah	Reviu HPS pada Proyek Strategis Reviu dilakukan oleh APIP. Proyek strategis yang diutamakan untuk dilakukan reviu adalah Proyek Strategis yang mendukung Visi Misi Kepala Daerah dan Konstruksi. ditetapkan setiap tahunnya oleh Kepala Daerah.1. Daftar 10 Proyek strategis melalui SK Kada;2. HPS dari 10 Proyek strategis;3. Kertas Kerja Kaji Ulang untuk 10 proyek strategis (HPS dilengkapi dengan sumber data pendukung kaji ulang dan analisisnya.4. Hasil Kaji Ulang yang dittd Ketua Pokja untuk diserahkan kepada PPK untuk 10 Proyek StrategisCatatan: Pokja bersama APIP melakukan reviu HPS dan jika tidak memiliki kemampuan teknis maka untuk kaji ulang dapat dibantu oleh Tenaga Ahli yang telah dilengkapi dengan perjanjian kerahasiaan. Lelang Dini pada PBJ Strategis 1. Daftar kegiatan Lelang Dini yang merupakan proyek strategis Pemda.2. Daftar pelaksanaan Lelang Dini, pagu, HPS, dan daftar pemenang.Lelang Dini dilakukan sebelum APBD 2024 berjalan, sehingga dilaksanakan di tahun 2023.Reviu HPS juga sudah dilakukan di tahun 2023.	Biro PBJ	100%	
	Tindak Lanjut Reviu Tata Kelola PBJ	1. Daftar jumlah dan Isi Rekomendasi hasil Reviu tahun 2022. 2. Daftar reviu yang telah ditindaklanjuti. 3. Dokumen Bukti Tindak Lanjut reviu tata kelola PBJ telah dilaksanakan. 4. Penghitungan % Tindak lanjut Hasil Reviu yang ditindaklanjuti atas reviu Tata Kelola PBJ Reviu Tata Kelola PBJ dilakukan setiap 2 tahun sekali (Tahun 2022 atau 2023).	Biro PBJ, Inspektorat	100%	
	Survey Kepuasan Masyarakat	Survey ini dilakukan oleh UKPBJ (bekerjasama dengan OPD terkait lainnya) untuk mendapatkan respon atas kegiatan PBJ mencakup pada point: - Kepuasan pemberian layanan PBJ - Transparansi dan akuntabilitas kegiatan PBJ - Integritas SDM yang melaksanakan PBJ (UKPBJ, Panitia PBJ dari OPD) - Kemanfaatan barang/ jasa - Kualitas barang/ jasa Survey dilaksanakan di tahun 2023 untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan pada tahun 2022. Dokumen Kelengkapan: 1. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa 2. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Survey dilakukan oleh UKPBJ (bekerjasama dengan OPD terkait lainnya) yang bertujuan untuk:	Biro PBJ	70%	Lengkapi data dukung yang kurang

			<p>a. Meminimalkan potensi penyusunan/ Gratifikasi atas layanan pengadaan barang dan jasa.</p> <p>b. Memastikan kemanfaatan atas barang dan jasa Survey dilakukan dengan responden: (1). Vendor; (2). Penerima manfaat/ masyarakat yang menerima manfaat atas kegiatan PBJ yang dilakukan. Point-point Survey dan respondennya adalah:</p> <p>c. Layanan - vendor. Transparansi - vendor. Integritas UKPBJ/ Panitia PBJ dari OPD - vendor. Kemanfaatan barang/ jasa – penerima manfaat/ masyarakat.</p> <p>Kualitas barang/jasa – penerima manfaat/ masyarakat Survey dilakukan minimal 1 tahun sekali pada akhir tahun berjalan.</p> <p>3. Dokumen yang menjelaskan upaya Pemda dalam melakukan perbaikan sebagai respon TL Survei Kepuasan Masyarakat.</p>			
	Vendor Manajemen System	<p>1. Database Penyedia dilengkapi dengan nama penyedia, alamat, nama direksi, nama pengadaan yang dilaksanakan, periode waktu pelaksanaan, Hasil Penilaian PPK (Sesuai PerLKPP 4/2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Penyedia Barang/Jasa Pemerintah), catatan hasil temuan BPK atas penyedia, nama pokja pelaksana permasing masing pengadaan (dibuat dalam Tabel)</p> <p>2. Contoh Lembar Penilaian Kinerja Penyedia sebanyak 10% dari total pengadaan tender/seleksi yang telah dilakukan dalam 1 tahun</p>	Biro PBJ	80%	<p>lengkapi data sesuai permintaan:</p> <p>1. Database Penyedia dilengkapi dengan nama penyedia, alamat, nama direksi, nama pengadaan yang dilaksanakan, periode waktu pelaksanaan, Hasil Penilaian PPK (Sesuai PerLKPP 4/2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Penyedia Barang/Jasa Pemerintah), catatan hasil temuan BPK atas penyedia, nama pokja pelaksana permasing masing pengadaan (dibuat dalam Tabel)</p> <p>2. Contoh Lembar Penilaian Kinerja Penyedia sebanyak 10% dari total pengadaan tender/seleksi yang telah dilakukan dalam 1 tahun</p>	
3.	Penguatan Profesionalisme UKPBJ	Penguatan SDM UKPBJ	<p>UKPBJ memiliki 4 fungsi, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelola PBJ; - Pengelola LPSE; - Pembinaan SDM dan Kelembagaan; - Pendampingan dan konsultasi/bimtek PBJ - Fungsi lainnya yang ditugaskan oleh Kepala daerah <p>Dokumen yang harus disampaikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen SK Kada pengangkatan Personil di UKPBJ; 2. Struktur Organisasi UKPBJ 3. Data jumlah Fungsional Pengadaan yang ada di Pemda disertai SK (baik SK Fungsional Pengadaan yang ada di UKPBJ maupun OPD lainnya) atau mengacu pada data yang ada di https://ppsdm.lkpp.go.id/jumlah-dan-persebaran-jabfung-ppbj/pemda 4. Data ABK masing-masing Fungsi UKPBJ dan data Riil yang ada di masing-masing Fungsi UKPBJ; 5. Daftar Penempatan Personel di masing masing fungsi UKPBJ berdasarkan Surat Keputusan Kepala UKPBJ. 	Biro PBJ	40%	Lengkapi data dukung yang kurang

	TPP Khusus PBJ	1. Kertas Kerja Dasar Perhitungan TPP Pengadaan yang memperhitungkan faktor resiko pengadaan; (dikaitkan dengan Beban Kerja yang ada di UKPBJ)2. SK Kepala Daerah tentang Penetapan TPP UKPBJ (khusus) berikut besarnya3. Daftar Penerima TPP UKPBJ;4. Bukti Pembayaran TPP kepada pegawai UKPBJ (SP2D)	Biro PBJ, BPKPD, Biro Hukum	80%	tolong lengkapi:- Kertas Kerja Dasar Perhitungan TPP
	SUB JUMLAH			74%	

10. Indeks Tata Kelola Pengadaan

PENILAIAN FINAL INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN (ITKP) KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN PEMERINTAH DAERAH (K/L/Pemda) TAHUN 2023

No	Nama K/L/PD	Bentuk Instansi	SIRUP	e-Tendering	e-Purchasing	Toko Daring	Non e-Tendering/Non e-Purchasing	e-Kontrak	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Tingkat Kematangan UKPBJ	Total Nilai Pembobotan	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi	10,00	4,37	0,00	1,00	5,00	3,98	30,00	35,56	89,91	Baik
2	Kabupaten Mamuju	Kabupaten	10,00	4,97	0,00	0,00	3,93	3,50	6,00	8,89	37,29	Kurang
3	Kabupaten Polewali Mandar	Kabupaten	7,32	4,58	0,00	0,00	3,26	2,39	8,33	22,22	48,10	Kurang
4	Kabupaten Majene	Kabupaten	0,00	5,00	0,00	0,00	3,87	3,84	18,00	17,78	48,49	Kurang
5	Kabupaten Pasangkayu	Kabupaten	5,95	4,86	0,00	0,00	3,18	4,48	12,00	0,00	30,47	Kurang
6	Kabupaten Mamasa	Kabupaten	10,00	4,95	0,00	0,00	0,00	3,96	0,00	4,44	23,35	Kurang
7	Kabupaten Mamuju Tengah	Kabupaten	10,00	4,77	0,00	0,00	0,00	4,62	6,00	4,44	29,83	Kurang

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.10
Realisasi anggaran Biro Pengadaan Barang dan Jasa tahun
2023

Sasaran	Program/kegiatan	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian
Optimalnya Kebijakan di Bidang Pengelolaan Barang dan Jasa	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 924.339.764,00	Rp 901.566.708,00	97,53
	Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 1.487.965.518,00	Rp 1.453.001.499,00	97,65
Jumlah Realisasi Kinerja Anggaran		Rp 2.412.305.282,00	Rp 2.354.568.207,00	97,61

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam rangka perwujudan good governance, dari hasil realisasi dan analisis kinerja kegiatan serta analisis pencapaian sasaran dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2023 baik dilihat dari segi pencapaian kinerja kegiatan maupun pencapaian sasaran cukup berhasil dilaksanakan, karena masing-masing kegiatan telah terlaksana sesuai dengan yang diprogramkan dan telah mencapai sasaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Secara umum pula dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja telah tercapai sesuai target yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 dan target jangka menengah.

A. Kesimpulan

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2023 ini menyajikan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa pada tahun anggaran 2023.
2. Melanjutkan upaya implementasi kematangan kelambagaan UKPBJ dapat di tingkatkan dari level 3 (proaktif) menuju level 4 (strategis) atau level 5 (unggul).
3. Melanjutkan upaya implementasi kematangan kelembagaan UKPBJ.

B. Rekomendasi

1. Melanjutkan proses pengelolaan katalog lokal untuk pengembangan dan pembinaan pelaku usaha lokal dapat ikut serta dalam proses pengadaan barang/jasa di daerah.
2. Perbaiki sarana dan prasarana Biro Pengadaan Barang dan Jasa.
3. Pengembangan kompetensi SDM PBJ Biro Pengadaan Barang dan Jasa .

Semoga laporan tahun 2023 ini dapat menjadi bahan dalam menetapkan dan meningkatkan kualitas kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa di masa mendatang.

-oOo-